

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kota Palopo pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, meskipun terdapat tekanan pada beberapa komoditas pangan strategis. Secara bulanan (month-to-month), inflasi tercatat sebesar 0,37% pada Januari 2026, meningkat menjadi 0,49% pada Februari 2026, dan kembali melandai menjadi 0,20% pada Maret 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi pada setiap bulan, seiring dengan fluktuasi harga komoditas pangan.

Dari sisi perkembangan harga, sebagian besar komoditas kebutuhan pokok relatif stabil, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu yang tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang triwulan. Namun demikian, beberapa komoditas pangan bergejolak (volatile food) mengalami fluktuasi harga yang cukup tajam.

Pada bulan Januari, terjadi penurunan harga pada komoditas cabai merah dan cabai rawit, sementara tomat mengalami kenaikan harga. Memasuki bulan Februari, tekanan inflasi mulai meningkat yang ditandai dengan kenaikan harga pada komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang merah, bawang putih, serta tomat. Kenaikan ini dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadan.

Selanjutnya pada bulan Maret, fluktuasi harga masih terjadi, terutama pada komoditas cabai merah, ikan segar (tongkol dan udang), serta daging ayam ras yang mengalami kenaikan. Di sisi lain, beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan cabai rawit mengalami penurunan harga. Kenaikan harga pada bulan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta kenaikan biaya distribusi.

Secara umum, kondisi inflasi Kota Palopo pada Triwulan I Tahun 2026 masih dalam kategori terkendali, namun tetap memerlukan kewaspadaan melalui penguatan koordinasi TPID, pengamanan pasokan, serta stabilisasi harga guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis perkembangan inflasi di Kota Palopo selama Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa permasalahan utama yang memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi di daerah, khususnya yang berkaitan dengan komoditas pangan dan faktor eksternal.

Permasalahan pertama adalah ketergantungan pasokan dari luar daerah, terutama untuk komoditas pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai rawit, bawang merah, tomat, dan ikan segar. Ketergantungan ini menyebabkan Kota Palopo sangat rentan terhadap gangguan produksi di daerah sentra, sehingga berdampak langsung pada ketersediaan dan harga di tingkat konsumen.

Permasalahan kedua adalah gangguan pasokan akibat faktor cuaca ekstrem. Pada bulan Januari hingga Februari 2026, curah hujan yang tinggi mengganggu produksi pertanian, sementara pada bulan Maret terjadi gelombang tinggi yang menghambat aktivitas perikanan

dan distribusi hasil laut. Kondisi ini menyebabkan terganggunya pasokan dan mendorong kenaikan harga beberapa komoditas.

Permasalahan ketiga adalah peningkatan permintaan musiman, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Lonjakan permintaan masyarakat terhadap komoditas seperti daging ayam, telur, cabai, bawang, dan tomat menyebabkan tekanan harga yang cukup signifikan, terutama pada bulan Februari hingga Maret 2026.

Permasalahan keempat adalah panjangnya rantai distribusi. Distribusi komoditas dari daerah produsen ke Kota Palopo masih melalui beberapa perantara, yang mengakibatkan tingginya margin perdagangan (sekitar 20-30%). Hal ini menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat produsen.

Permasalahan kelima adalah kenaikan biaya operasional dan distribusi. Peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) serta biaya transportasi, termasuk angkutan antar kota, berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang. Selain itu, kenaikan harga pakan ternak turut memengaruhi harga komoditas peternakan seperti daging ayam dan telur.

Permasalahan keenam adalah pengaruh faktor eksternal/global, seperti kenaikan harga emas dunia yang berdampak pada inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta fluktuasi harga komoditas impor yang turut memengaruhi harga domestik.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi di Kota Palopo pada Triwulan I Tahun 2026 didominasi oleh faktor pasokan, distribusi, dan tekanan permintaan musiman. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi, khususnya dalam penguatan kerja sama antar daerah, stabilisasi distribusi, serta pengendalian ekspektasi masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palopo pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan secara terkoordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengacu pada empat pilar pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai langkah konkret telah dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Salah satu upaya utama adalah pemantauan harga secara rutin dan terfokus terhadap komoditas pangan strategis. Pemantauan dilakukan setiap hari kerja oleh Dinas Perdagangan terhadap 10 komoditas volatile food, antara lain cabai rawit, bawang merah, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan bandeng, ikan tongkol, udang, beras premium, dan minyak goreng. Kegiatan ini dilaksanakan di pusat-pusat perdagangan utama seperti Pusat Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Andi Tadda, serta dilaporkan secara berkala melalui sistem nasional.

Selain itu, dilakukan pemantauan pasar dan inspeksi mendadak (sidak) kepada distributor, termasuk distributor gas elpiji dan gudang penyimpanan bahan pokok. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan barang maupun praktik distribusi yang tidak wajar, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Dalam aspek koordinasi, TPID Kota Palopo secara rutin melaksanakan rapat koordinasi mingguan yang membahas perkembangan harga, kondisi pasokan, serta langkah-langkah intervensi yang diperlukan. Rapat ini menjadi forum strategis dalam pengambilan keputusan cepat dan responsif terhadap dinamika inflasi di daerah.

Upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa momentum penting, antara lain pada tanggal 21-24 Januari 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu, serta pada tanggal 11-15 Maret 2026 di sembilan kecamatan dalam rangka menyambut Idul Fitri. Selain itu, juga dilaksanakan Gerakan Pangan Murah serentak pada tanggal 11 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat serta menekan gejolak harga di pasar.

Selanjutnya, TPID juga memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil komoditas, seperti Kabupaten Enrekang (cabai dan bawang merah), Kabupaten Luwu Timur (ikan bandeng dan ikan tongkol), serta Kabupaten Toraja (tomat dan sayuran). Kerja sama ini difokuskan pada upaya menjamin kelancaran pasokan dengan mekanisme distribusi langsung ke pusat niaga.

Dalam rangka mengendalikan ekspektasi masyarakat, dilakukan edukasi dan sosialisasi melalui pemasangan spanduk himbauan “Belanja Bijak, Jangan Panic Buying” di pasar-pasar serta penyampaian informasi melalui pengeras suara. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas psikologis pasar dan mencegah perilaku konsumsi berlebihan.

Terakhir, dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha oleh tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Kepolisian. Pengawasan ini difokuskan pada pencegahan praktik penimbunan barang, permainan harga, dan spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga secara tidak wajar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palopo pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan secara aktif dan terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palopo selama Triwulan I Tahun 2026, secara umum upaya yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga, khususnya melalui intervensi pasar dan pengawasan distribusi.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah terbukti efektif dalam menekan lonjakan harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Kegiatan ini mampu meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan di pasar. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak langsung dalam mengendalikan ekspektasi harga di tingkat konsumen.

Dari sisi koordinasi dan kerja sama antar daerah (KAD), upaya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung kelancaran pasokan komoditas pangan.

Namun demikian, kerja sama yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional, sehingga perlu diperkuat terutama dalam hal mekanisme distribusi, kepastian volume pasokan, serta keberlanjutan kerja sama.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dinilai cukup efektif dalam mencegah praktik penimbunan barang dan permainan harga. Hal ini berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di pasar, meskipun masih diperlukan penguatan pengawasan secara lebih intensif, khususnya pada periode rawan inflasi.

Di sisi lain, pemantauan harga secara rutin telah berjalan optimal dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan responsif. Namun, pemanfaatan data hasil pemantauan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam membangun sistem peringatan dini (early warning system) yang lebih efektif dalam mengantisipasi gejolak harga.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengendalian inflasi daerah. Stabilitas harga komoditas pangan bergejolak (volatile food) masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi cuaca dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Selain itu, panjangnya rantai distribusi serta fluktuasi biaya transportasi juga menjadi faktor yang sulit dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palopo pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan efektif, terutama dalam menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar dan pengawasan. Namun, ke depan diperlukan penguatan pada aspek pasokan dan distribusi, serta peningkatan efektivitas kerja sama antar daerah agar pengendalian inflasi dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026, serta dalam rangka mengantisipasi potensi tekanan inflasi ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palopo merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, penguatan pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan frekuensi dan memperluas jangkauan pelaksanaan operasi pasar, khususnya pada wilayah dengan tingkat kerentanan harga yang tinggi. Selain itu, perlu dilakukan penambahan volume dan variasi komoditas pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai, bawang, tomat, daging ayam, dan telur guna memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kedua, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Kerja sama yang telah terjalin dengan daerah penghasil perlu ditingkatkan dari sekadar komitmen menjadi kerja sama yang lebih operasional dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan perjanjian teknis terkait volume pasokan, jadwal distribusi, serta pembentukan tim logistik bersama guna menjamin kelancaran distribusi komoditas pangan.

Ketiga, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) dalam pengendalian inflasi. Pemerintah daerah perlu menetapkan ambang batas harga komoditas tertentu sebagai

indikator intervensi cepat. Sebagai contoh, apabila harga cabai rawit melebihi Rp70.000/kg atau bawang merah melebihi Rp45.000/kg dalam beberapa hari berturut-turut, maka operasi pasar harus segera dilaksanakan tanpa menunggu proses koordinasi yang panjang.

Keempat, antisipasi khusus menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama Idul Adha. TPID perlu melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan peternak dan pelaku usaha terkait pada H-14 untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, khususnya untuk komoditas daging. Selain itu, operasi pasar perlu dilakukan secara intensif pada periode H-3 hingga H+3 dengan fokus pada komoditas strategis.

Kelima, penguatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi terkait harga acuan dan ketersediaan pangan melalui berbagai media, termasuk pemasangan spanduk, pemanfaatan media sosial, serta penyampaian informasi di pasar tradisional. Edukasi kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying juga perlu terus digencarkan guna menjaga stabilitas permintaan.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, meningkatkan ketahanan pasokan, serta mempercepat respons terhadap gejolak harga. Dengan implementasi yang konsisten dan terintegrasi, diharapkan pengendalian inflasi di Kota Palopo ke depan dapat semakin efektif dan berkelanjutan.